

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan hal ini merupakan kewajiban yang dapat dipenuhi untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak memainkan peran yang sangat penting dan semakin banyak digunakan untuk pembangunan dan belanja publik. Kegiatan membayar pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak dan mencerminkan kewajiban negara di bidang perpajakan. Dan pajak kendaraan merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah di provinsi tersebut. Di antara sekian banyak pajak daerah, pajak kendaraan merupakan pajak yang sumber penerimaannya relatif besar. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pembangunan dan pelayanan publik (Huwaidda dan Kamilah, 2024). Di Indonesia, PKB dalam hal ini diatur UU Lalu Lintas dan Jalan No 22 Tahun 2009. Pemilik kendaraan bermotor membayar PKB kepada pemerintah atas penggunaan kendaraan bermotor di jalan umum (Guritno dan Saputra, 2022). Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menetapkan target penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dicapai untuk menjamin stabilitas keuangan daerah.

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama 2024**

Objek	Target	Realisasi					
		31 Januari 2024	%	29 Februari 2024	%	31Maret 2024	%
PKB	1.198.685.750.280	103.771.929.225	8,66	189.368.610.775	15,80	283.375.471.700	23,64
BBNKB	1.084.291.212.352	101.783.341.625	9,39	188.887.024.875	17,42	280.388.706.625	25,86
<b>Total</b>	<b>2.282.976.962.632</b>	<b>205.555.270.850</b>	<b>9,00</b>	<b>378.245.635.650</b>	<b>16,57</b>	<b>563.764.178.325</b>	<b>24,69</b>

Sumber : Bapenda Sumatera Selatan, 2024

Pada tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2024 Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1.198.685.750.280. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Sumsel dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan. Berbagai strategi dan pedoman telah diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan tabel data di atas, terlihat realisasi PDB mengalami kemajuan pada triwulan I tahun 2024.

Pada tanggal 31 Januari 2024, realisasi PKB tercatat sebesar Rp 103.771.929.225 yang artinya telah mencapai 8,66% dari target tahunan. Angka ini menunjukkan awal yang baik dalam upaya pencapaian target tahunan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2024, realisasi PKB meningkat menjadi Rp 189.368.610.775 atau setara dengan 15,80% dari target tahunan. Kenaikan nominal sebesar Rp 85.597.681.550 dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 31 Maret 2024, realisasi PKB kembali meningkat menjadi Rp 283.375.471.700 atau setara dengan 23,64% dari target tahunan. Kenaikan nominal sebesar Rp 94.005.860.925 dari bulan Februari menunjukkan trend positif dalam pencapaian target PKB provinsi Sumatera

Selatan tahun 2024.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi PKB Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap bulannya pada bulan Januari-Maret 2024. Meskipun jumlah nominal pendapatan terus meningkat, presentase kenaikan bulan ke bulan menunjukkan trend menurun, kenaikan dari Januari ke Februari mencapai 82,49%, sedangkan kenaikan dari Februari ke Maret hanya 49,64%. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan setiap bulan, namun kelajuan pertumbuhan menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu tindakan pemerintah adalah menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan penyediaan layanan Samsat Corner (Eko dan Rahayu, 2022). Samsat Corner merupakan layanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan dan pembayaran pajak kendaraan (PKB) yang ditempatkan di pusat perbelanjaan atau tempat strategis lainnya. Keberadaan Samsat Corner diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan (Efriandy et al., 2020).

Selain faktor pelayanan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak juga diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor. Pendidikan tinggi seharusnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak (Yustina et al., 2020). Namun, hubungan kerja yang berbeda mungkin mencerminkan tingkat pendapatan dan mobilitas yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan (Qorina, 2020).

Pengaturan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Misalnya saja dalam mengendarai kendaraan bermotor, sangat penting untuk memperpanjang masa berlaku STNK setiap tahunnya dan mengganti STNK setiap lima tahun sekali. Validasi STNK tergantung STNK aktif atau tidak. Pengemudi kendaraan bermotor bisa dikenakan sanksi jika STNK sudah habis masa berlakunya. Kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat karena diterapkannya sanksi pajak kendaraan menjadi sarana hukum untuk menjamin wajib pajak membayar dengan benar. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak kendaraan merupakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan. Dengan adanya sistem kendaraan bermotor ini maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat, sehingga diharapkan jumlah wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya akan semakin meningkat. Untuk mengurangi Berdasarkan besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan keuangan daerah, maka jenis pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan yang cukup signifikan meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan.

Samsat *Corner* Pangkalan Balai memiliki karyawan tetap ataupun tidak tetap. Untuk mengetahui fenomena tersebut, dilakukan survei terhadap wajib pajak di Samsat *Corner* Pangkalan Balai. Kuesioner disebarkan kepada 45 responden. Kuesioner yang disebar meliputi pernyataan mengenai pelayanan samsat *corner*, pendidikan, pekerjaan dan kepatuhan wajib pajak Samsat *Corner*.

Hasil survei memenuhi harapan.

Penelitian ini penting untuk menganalisis dampak pelayanan Samsat *Corner*, pendidikan dan pekerjaan terhadap kewajiban pajak kendaraan Samsat Pangkalan Balai. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan pajak kendaraan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor saat membayar pajak motor yaitu pelayanan samsat *Corner*, pendidikan dan pekerjaan wajib pajak. Hal ini pun yang menjadi alasan penulis dalam membuat judul “**Analisis Pelayanan Samsat *Corner*, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Pangkalan Balai**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pelayanan Samsat *Corner* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai?
2. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai?
3. Apakah Pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan Samsat *Corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai.
3. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkalan Balai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Universitas PGRI Palembang**

- a. Diharapkan dari penelitian ini mengembangkan teori tentang pengaruh pelayanan publik terhadap sebagai sumber informasi tentang pelayanan samsat *Corner* kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Diharapkan dari penelitian ini sebagai penambahan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Diharapkan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang tentang topik yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, pelayanan publik dan administrasi perpajakan.

## **2. Bagi Obyek Penelitian**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pemahaman tentang variabel, penelitian SAMSAT *Corner*.
- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Samsat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

